



► PROGRAM PEMBANGUNAN

Penataan Kali Code Harus Libatkan & Sejahterakan Masyarakat

Penataan kawasan kumuh di bantaran Kali Code perlu melibatkan sekaligus menyejahterakan masyarakat sekitar. Pelibatan dimulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Sementara, penyejahteraan masyarakat di bantaran Kali Code bisa menggunakan beragam skema.

Hal tersebut disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY, Karyanti Pratiwi, dalam Podcast Pembangunan Biro PIWP2 Setda DIY bertema Penataan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Code yang berlangsung, Jumat (22/8).

Pratiwi mengatakan penataan kawasan kumuh di bantaran Kali Code melibatkan beragam sektor, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, Kota Jogja, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi, dan lainnya. Kolaborasi ini dilakukan agar penataan kawasan kumuh di bantaran Kali Code bermanfaat untuk banyak pihak. "Di bantaran Kali Code ada banyak permasalahan [dan juga potensi] mulai dari sosial, ekonomi, hingga budaya. Semuanya kami petakan, dan ada skala prioritas penanganannya. Misalnya kami berupaya tidak sebatas menata sarana sanitasi, tapi juga memberdayakan masyarakat," katanya.

Pemberdayaan ini banyak bentuknya, bisa dengan pelatihan dan pendampingan di aspek sosial dan ekonomi. Pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah dan sanitasi, hingga membersamai usaha kecil menengah yang berada



Anggota Komisi C DPRD DIY, Muhammad Lisman Puja Kesuma (dua dari kiri); Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY, Karyanti Pratiwi (tiga dari kiri) dan Kabid Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kota Jogja, Sigit Setiawan, saat menjadi narasumber dalam Podcast Pembangunan bertema Penataan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Code, yang berlangsung Jumat (22/8).

di kawasan Kali Code. "Termasuk dari pembiayaan, sumbernya tidak selalu dari pemerintah, kadang iuran dan *corporate social responsibility*," kata Pratiwi.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Sigit Setiawan, mengatakan pada 2016, ada penataan kawasan kumuh di Kota Jogja. Ada tujuh indikator kawasan kumuh, yaitu drainase, sanitasi, tata bangunan, jalan lingkungan, sampah, dan air bersih. Temuan memperlihatkan bahwa 80% kawasan kumuh Kota Jogja berada di bantaran sungai.

"Ada tiga skema penataan yaitu pemugaran, peremajaan, dan relokasi. Di awal pamugaran, kami melaksanakan program M3K, atau *Mundur Munggah Madhep Kali*," katanya.

Rumah di bantaran sungai dipotong tiga meter (*mundur*), untuk menjadi jalan. Kemudian rumah menjadi

dua lantai (*munggah*). Setelahnya, rumah dibuat menghadap sungai (*Madhep Kali*).

Anggota Komisi C DPRD DIY, Muhammad Lisman Puja Kesuma, mengatakan sebagai bagian dari legislatif, dia berperan sebagai pengawas. DPRD DIY perlu memastikan masyarakat merasakan dampak dari program, terutama yang terdampak di kawasan bantaran Kali Code. Puja beranggapan bahwa penataan kawasan kumuh melibatkan banyak orang, tidak hanya satu dua orang, atau satu atau dua kelompok saja. Selain itu, DPRD DIY juga menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus menyosialisasikan program pemerintah ke akar rumput. Dewaan, menurut Puja, juga mengawasi dari sisi anggaran.

"Termasuk berapa aplikasi anggaran, benar-benar dirasakan masyarakat atau tidak, jangan hanya untuk sekelompok orang saja," katanya. (Sirojul Khatid/*)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas PUPKP | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005